



BPK Butuh Dokumen Audit Bansos Untan

PONTIANAK, TRIBUN - Koordinator Wilayah Kalbar IA, Badan Pemeriksa Keuangan RI Diva Mahendra menyatakan telah menyelesaikan proses perhitungan kerugian negara pada kasus dana Bansos KONI. Sementara untuk audit dana Bansos ke Fakultas Kedokteran Untan masih berjalan.

"Perhitungan sekarang yang kita sedang lakukan proses, BPK sudah menyelesaikan perhitungan kerugian untuk dana Bansos Provinsi Kalbar yang ke KONI, tahun 2007, 2008, dan 2009. Yang sedang kami kerjakan sekarang yaitu terkait atas kasus dana Bansos yang ke dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan tahun 2006, 2007 dan 2008," ujar Diva kepada *Tribun*, Selasa (10/12).

dapat dilakukan penghitungan kerugian. "Saat ini kami masih menunggu, jadi apabila kami itu bisa diperoleh maka kami bisa melakukan proses penghitungannya. Untuk Bansos KONI Maret 2012 sudah kita serahkan, untuk Untan, pihak Polda posisi terakhir September 2013 dan itu kami sudah jawab suratnya bahwa kami masih membutuhkan tambahan maupun dokumen-dokumen baru yang harus didapatkan pihak penyidik. Saat ini, dokumen yang kita minta belum masuk lagi," tukasnya.

Kasus dana Bansos KONI bermula saat Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDIT) atas pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemprov Kalbar dengan LHP nomor 23/HP/HP/XIX/PNK/09/2009 tanggal 15 September 2009 ke KPK

melalui surat nomor 08/R/S/I-VIII/01/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Oleh KPK, proses hukum terkait temuan tersebut dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Polda Kalbar melalui surat nomor B/62/IV/2011/Krimsus-IV tanggal 20 April 2011 meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK RI.

"BPK RI perwakilan Kalbar melalui surat nomor 132/S/XIX.PNK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 kepada kepolisian daerah Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dikarenakan sampai pada saat ini Polda Kalbar belum melengkapi dokumen dan bukti pendukung seperti halnya dimaksud dalam kesimpulan pemaparan di atas, maka BPK RI Kalbar belum dapat melanjutkan proses ke penghitungan kerugian keuangan negara," tukasnya. (rhd)